

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT. BPR WIJAYAMULYA
SANTOSATAHUN 2023



Jln. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Sagan Yogyakarta
TELEPON: (0274) 557185, 551390

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Wijayamulya Santosa pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023.

Dalam menjalankan operasional perbankan BPR Wijayamulya Santosa senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR WS dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Wijayamulya Santosa dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran (fairness).

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Wijayamulya Santosa selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun-tahun mendatang, PT. BPR Wijayamulya Santosa terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Wahyudi Widodo
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko h. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan;		
2.	Nama	:	Donisius Santoso
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
- c. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
- d. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian

kepada pegawai.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan. e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2023. f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Imam Darmanto
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi.		
	b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.		
	c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.		
	d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku		
	e. Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab minimal dalam 1 tahun mengadakan 4 kali rapat Dewan Komisaris.		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.		
	b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.		
	c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia		
	d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.		
	e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2023.		
	f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.		
	g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akusisi bisnis		

Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Pada tahun 2023 BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak memiliki anggota komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-

	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak memiliki anggota komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyudi Widodo	Rp190.000.000	2.84%
2.	Donisius Santoso	Rp346.000.000	5.16%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Direktur 1 memiliki saham 2,84 %			
2. Direktur 2 memiliki saham 5,16 %			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyudi Widodo	-	-	0%
2.	Donisius Santoso	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyudi Widodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	Donisius Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyudi Widodo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Donisius Santoso	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Imam Darmanto	Rp500.000.000	7.46%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris memiliki saham sebesar 7.46 %			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Imam Darmanto	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan
-----	----------------------	-------------------

		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Imam Darmanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Imam Darmanto	Tidak ada	Tidak ada	Imam Budiarto - Saudara
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Memiliki Hubungan Keluarga antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp33.000.000	1	Rp13.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp7.000.000	1	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp40.000.000		Rp13.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Komisaris mendapatkan tunjangan remunerasi berupa gaji					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diberikan transportasi berupa mobil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.84 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.05 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.57 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.93 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	23 Januari 2023	3	1. Evaluasi kinerja tahun 2022 2. Membahas tentang penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) R.D ANTO WIDIYATMOKO oleh Komisaris 3. Persetujuan perpanjangan sewa gedung selama 4 (empat) tahun 4. Peningkatan perfoma dan memperbaiki kualitas

			kredit
2.	15 Maret 2023	3	Pembahasan Evaluasi kinerja bulan Februari 2023, Penyaluran kredit melalui kredit promo selama Ramadhan tahun 2023 dan pemberian THR 2023
3.	09 Agustus 2023	8	Evaluasi kinerja bulan Juli 2023 dan strategi yang akan ditempuh pada semester II tahun 2023
4.	03 November 2023	3	Membahas RBB 2024 yaitu
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat ditahun 2023 dilakukan sebanyak 4 kali			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Imam Darmanto	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris hadir dalam rapat komisaris sebanyak 4 x dalam setahun Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR 2 kali dalam seminggu				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal berupa fraud								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tahun 2023 BPR tidak mempunyai Permasalahan Hukum yang dihadapi		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tahun 2023 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tahun 2023 BPR tidak memberikan Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Wijayamulya Santosa
Alamat : Jln. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Sagan Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 557185, 551390
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp8.103.671.377
Total Aset : Rp31.292.513.859

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Wijayamulya Santosa Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.74	0.348
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.10	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.19	0.219
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.80	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.12	0.212
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.70	0.203
10	Rencana Bisnis BPR	2.54	0.191
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.05	0.154
Nilai Komposit			2.100
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Direksi BPR Wijayamulya Santosa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang juga sebagai Direktur YMF Kepatuhan dan Direktur

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Wijayamulya Santosa sebanyak 1 (satu) orang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Wijayamulya Santosa belum menerapkan komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.19)

BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki Direktur Utama sekaligus Direktur YMF Kepatuhan dan juga Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di BPR Wijayamulya Santosa telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

BPR Wijayamulya Santosa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.12)

BPR Wijayamulya Santosa telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuannya telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.7)

BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.54)

Rencana Bisnis Bank BPR Wijayamulya Santosa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.05)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Wijayamulya Santosa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang memadai

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Wijayamulya Santosa mempunyai nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik sama seperti hasil penilaian tahun 2022.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

PT. BPR Wijayamulya Santosa

Disiapkan oleh



Wahyudi Widodo, SE
Direktur Utama



Disetujui oleh



Imam Darmanto, SE
Komisaris